

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daging sapi merupakan sumber protein hewani yang bermutu tinggi dan perlu dikonsumsi untuk kebutuhan protein manusia, daging sapi digolongkan sebagai salah satu produk peternakan penghasil bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan bagi pemeliharaan, pertumbuhan dan pengganti kebutuhan jaringan yang rusak. Daging sapi memiliki kandungan protein yang berguna dalam memenuhi standar konsumsi masyarakat terhadap daging, standar kebutuhan protein pada anak balita 2-2,25 gram per kilogram berat badan sedangkan untuk orang dewasa hanya 1 gram per kilogram berat badan (Haromain 2010). Mengingat daging sapi sangat penting untuk kebutuhan konsumsi masyarakat maka Pemerintah Indonesia sangat mendukung agar terpenuhinya kebutuhan daging sapi dalam negeri untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Bentuk dukungan dan sikap pemerintah dalam ketahanan pangan khususnya ketersediaan daging sapi diwujudkan melalui kebijakan swasembada daging sapi nasional. Kebijakan swasembada daging sapi merupakan salah satu program Kementerian Pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan utama bagi masyarakat. Program ini sesuai amanat Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025 dan tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke-2 (2010-2014), dimana pembangunan pertanian tetap memegang peran yang strategis dalam perekonomian nasional sebagai penyedia bahan pangan (Kusriatmi 2014).

Konsep swasembada daging sapi adalah ketersediaan daging sapi minimal 90 persen untuk dikonsumsi yang dipasok dari sapi domestik, sementara 10 persen sisanya dipenuhi melalui impor, baik dalam bentuk sapi bakalan maupun daging sapi beku. Program pencapaian swasembada daging sapi di Indonesia telah dicanangkan sejak tahun 1995 dengan tema swasembada *on trend* sampai dengan pertengahan tahun 2000, pada waktu itu lebih kepada jargon tetapi kebijakan pemerintah tidak mendukung terhadap program tersebut, kemudian

pada tahun 2000 dilanjutkan dengan Program Kecukupan Daging Sapi dengan target Indonesia mencapai swasembada daging sapi pada tahun 2005. Pada kenyataannya program tersebut lebih banyak bersifat rencana dan sama sekali tidak didukung oleh anggaran yang memadai sehingga lebih banyak bersifat wacana (Tawaf 2014).

Program Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi (P2SDS) 2005-2010 merupakan kelanjutan Program Swasembada Daging sapi dari tahun sebelumnya. Strategi yang telah disusun dalam program belum juga mencapai swasembada daging sapi untuk tahun 2010, seiring dengan harapan pencapaian target PSDS 2014, pemerintah mulai tahun 2011 menata impor dengan memangkas jumlah impor sapi bakalan dan daging beku namun belum juga mampu menutupi kebutuhan dalam negeri secara mandiri, pada tahun 2013 supply sapi lokal hanya 70% dari total kebutuhan sehingga untuk mencapai swasembada daging sapi nasional 2014 tidak akan tercapai (Oktaviani 2013). Menurut Tawaf (2014) ada tujuh aspek penyebab ketidakberhasilan program swasembada daging sapi meliputi filosofi konsep swasembada daging sapi, akurasi data populasi sapi dan kerbau, kebijakan impor tanpa batas, data produksi dan konsumsi daging sapi, kebijakan harga, sistem logistik dan sarana penunjang sistem distribusi sapi dan daging dan program perbibitan. Selama ini kebutuhan daging sapi di Indonesia dipenuhi dari tiga sumber yaitu sapi lokal, sapi impor, dan daging impor. Jika tidak ada perubahan teknologi secara signifikan dalam proses produksi daging sapi dalam negeri, serta tidak adanya peningkatan populasi sapi yang berarti, maka senjang antara produksi daging sapi dalam negeri dengan jumlah permintaan akan semakin melebar, sehingga berdampak pada volume impor yang semakin besar. Padahal, syarat untuk swasembada daging sapi adalah minimal 90 persen pasokan sapi domestik untuk ketersediaan konsumsi (Junaidi 2013).

Kebutuhan daging sapi masyarakat Indonesia terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan daya beli masyarakat, dan perubahan gaya hidup. Data konsumsi daging sapi per kapita yang dikeluarkan oleh Pusdatin (2014) menunjukkan bahwa konsumsi daging sapi masyarakat Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dengan rata-rata peningkatan sebesar

3,23 persen setiap tahunnya. Peningkatan konsumsi daging sapi per kapita yang terjadi mengindikasikan bahwa kebutuhan daging sapi nasional terus meningkat sehingga akan berpengaruh secara agregat kepada peningkatan kebutuhan konsumsi daging sapi nasional (Nisa 2014). Setiap peningkatan 1 gram konsumsi daging sapi per kapita per tahun maka diperlukan peningkatan 1.500.000 ekor sapi siap potong untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tingginya kebutuhan masyarakat akan daging sapi mendorong pemerintah untuk dapat meningkatkan populasi sapi lokal guna mencukupi kebutuhan dalam negeri secara mandiri. Namun kenyataannya kondisi peternakan dalam negeri sebagai penghasil daging, telur dan susu belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut (Ariningsih 2014).

Secara umum pemenuhan kebutuhan daging sapi nasional masih tergantung kepada impor baik daging beku maupun sapi bangkalan, karena laju peningkatan konsumsi daging sapi (4%) lebih tinggi dibandingkan dengan laju peningkatan produksi sapi potong (2%) (Ardiyati 2012). Dalam jangka panjang terjadi kekurangan produksi daging sapi karena pengurangan ternak sapi yang berlebihan, termasuk didalamnya sapi betina produktif sebagai bibit untuk sapi peranakan sementara itu peternak belum mampu meningkatkan produksi sapi potong dengan skala besar karena sebagian besar produksi sapi potong di Indonesia lebih banyak didukung oleh peternakan rakyat. Data menunjukkan bahwa populasi sapi potong dan kerbau mengalami fluktuasi yang berdampak kepada penyediaan daging sapi untuk konsumsi, sementara itu kebutuhan konsumsi daging sapi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga akan terjadi kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan daging sapi nasional.

Tabel 1. Produksi dan Konsumsi Daging Sapi dan Kerbau Tahun 2010-2015

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sapi (ekor)	13.581.570	14.824.373	15.980.696	12.686.239	14.726.875	15.494.288
Kerbau (ekor)	1.999.604	1.305.078	1.438.295	1.109.636	1.335.147	1.381.331
Daging Sapi (ton)	436.450	485.335	508.905	504.819	497.669	523.926
Daging Kerbau (ton)	35.914	35.330	36.964	37.836	35.236	31.669
Kebutuhan konsumsi (ton)	418.248,73	450.726,72	510.937,42	550.457,92	593.516,62	639.857,57
Konsumsi daging sapi (Kg/kapita/tahun)	1,76	1,87	2,09	2,22	2,36	2,56

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Dirjen PKH (2015)

Berdasarkan Tabel. 1 terlihat dari tahun 2010 sampai tahun 2015 terjadi fluktuasi populasi sapi potong dan kerbau yang diiringi dengan produksi daging

sapi dan kerbau. Keadaan seperti ini hanya mampu menutupi kebutuhan sesaat terhadap permintaan daging sapi dalam negeri, belum lagi jika dihadapkan pada hari besar keagamaan dan acara besar lainnya. Total produksi daging sapi dalam negeri sampai tahun 2015 yang disajikan pada tabel 1 mencapai 523.926 ton ditambah dengan total produksi daging kerbau dalam negeri mencapai 31.669 ton. Dibandingkan dengan data kebutuhan konsumsi daging sapi sampai tahun 2015 mencapai 639.857,57 ton, maka ada kekurangan pasokan dalam negeri sebesar 84.262,57 ton, rata-rata kebutuhan daging sapi perkapita masyarakat pada tahun 2015 mencapai 2,56 kg/kapita/tahun (Ditjen PKH 2016).

Keadaan tersebut belum mampu mencukupi pemenuhan kebutuhan daging sapi nasional dengan demikian untuk memenuhi kekurangan pasokan dalam negeri pemerintah harus memenuhi dari impor. Sebenarnya pemenuhan kebutuhan daging sapi melalui impor telah lama dilakukan untuk menjaga ketersediaan daging sapi dalam negeri namun dengan volume besar melebihi 10 persen untuk kebutuhan domestik tidak sesuai dengan konsep swasembada. Menurut Ilham (2001) volume impor daging sapi Indonesia selama periode 1990-1999 mengalami peningkatan yang cukup tajam sebesar 21,94 persen pertahun. Selanjutnya menurut Talib dan Yudi (2008) Indonesia belum mandiri dalam penyediaan kebutuhan daging sapi nasional karena baru mampu memproduksi 70% dari kebutuhan daging sapi nasional dimana 30% kebutuhan lainnya dipenuhi melalui impor. Mulai tahun 2012 pemerintah mengeluarkan kebijakan menetapkan alokasi impor sapi ditekan menjadi 14,8% (Tawaf, 2014).

Indonesia merupakan negara net Impotir komoditas peternakan termasuk sapi potong sebagai bahan baku daging sapi, karena berada pada keadaan kelebihan permintaan (exceeds demand) yang mengakibatkan kenaikan harga. Jika tidak diimbangi dengan penawaran daging sapi akan mengakibatkan makin tingginya harga daging di tingkat konsumen, serta pengurangan populasi sapi di dalam negeri sehingga untuk menutupi kekurangannya harus mengimpor dari luar negeri. Kondisi ini terjadi karena adanya defisit produksi yang mengakibatkan harga daging sapi relatif tinggi dibanding dengan harga daging sapi di pasar dunia. (Yuzaria, 2009). Menurut penelitian Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri (2013) , faktor-faktor yang mempengaruhi harga daging sapi di dalam negeri dari

sisi permintaan adalah (1) jumlah permintaan daging sapi lokal, (2) jumlah penawaran daging sapi lokal, (3) selera, (4) faktor dummy hari besar keagamaan, dan (5) permintaan daging sapi impor. Tetapi menurut Nursalamah (2013) Permintaan daging sapi terus mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun harga daging sapi yang relatif mahal, hal ini dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan daging sapi dan implikasinya terhadap kebijakan impor.

Tidak tercapainya swasembada daging sapi pada setiap programnya menimbulkan tanda tanya pada berbagai pihak, apa saja penyebab atau permasalahan yang menyebabkan kegagalan swasembada daging sapi tersebut, padahal dari hasil penelitian Soetjana (2013) Konsumsi daging sapi/kerbau per kapita per tahun menunjukkan kinerja yang rendah , tingkat partisipasi konsumsi daging sapi/kerbau hanya sekitar 16% sementara tingkat partisipasi konsumsi sumber pangan hewani daging lainnya seperti daging unggas ternyata sudah tersedia dan lebih terjangkau oleh masyarakat luas sebesar 57% pendekatan partisipasi konsumsi dalam mengukur kinerja konsumsi per kapita per tahun untuk pangan hewani seperti daging sapi/kerbau akan membantu mengurangi eksploitasi sumberdaya alam untuk memproduksi daging sapi/kerbau.

Wilayah Indonesia yang luas harus menyediakan kebutuhan daging sapi yang cukup pada setiap daerah dan juga pertumbuhan penduduk akan semakin bertambah yang akan berdampak pada tingginya permintaan terhadap daging sapi, jika permintaan tinggi sementara penawaran tetap atau menurun akan menyebabkan daging sapi menjadi langka di tingkat konsumen sehingga terjadi kenaikan harga daging sapi tersebut, menurut teori penawaran dan permintaan ada interaksi antara penjual dan pembeli dipasar yang akan menentukan tingkat harga dari barang dan jasa serta jumlah barang dan jasa yang akan diperjual belikan dan juga menerangkan hubungan antara jumlah yang diminta dan harga komoditas (Sugiarto et al, 2007).

Melihat keadaan tersebut swasembada daging sapi nasional gagal tercapai karena stok atau ketersediaan daging sapi pada tahun tertentu tidak tersedia, sedangkan untuk volume impor dibatasi sementara populasi sapi dan kerbau, produksi daging sapi dalam negeri belum mampu menutupi permintaan daging

sapi nasional sehingga harga juga meningkat. Mempelajari kegagalan swasembada daging sapi dari periode ke periode tersebut banyak fenomena yang mempengaruhinya, untuk itu perlu diidentifikasi apa saja yang menyebabkan kegagalan dalam mencapai swasembada daging sapi nasional serta bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Perumusan Masalah

Program swasembada daging sapi dan kerbau yang dicanangkan oleh pemerintah selalu gagal pada setiap programnya. Program swasembada daging sapi menitik beratkan kepada kemandirian pemenuhan kebutuhan daging sapi dalam negeri minimal 90 % pasokan daging sapi berasal dari sumberdaya lokal, selebihnya bisa dipenuhi dari kuota impor. Data untuk melihat seberapa besar ketersediaan populasi sapi potong dan kerbau di Indonesia belum jelas kategori untuk menetapkan, karena setiap populasi sapi dan kerbau tidak seluruhnya tersedia untuk produksi daging sapi, ada untuk kebutuhan sapi betina produktif sebagai bibit dan ada juga untuk tabungan bagi masyarakat yang bergerak sebagai peternakan rakyat.

Produksi ternak sapi sangat ditentukan oleh ketersediaan sapi betina produktif sebagai faktor produksi utama. Tingginya tingkat pemotongan sapi betina produktif akan menghambat laju pertumbuhan produksi ternak sapi nasional. Menurut Ilham (2006), sekitar 28 persen sapi yang dipotong setiap hari merupakan betina produktif. Ada beberapa faktor yang mendorong pemotongan sapi betina produktif, antara lain: (1) peternak memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, (2) harga sapi betina lebih murah daripada sapi jantan, sedangkan harga jual dagingnya sama, (3) adanya pemotongan di luar RPH pemerintah, dan (4) RPH hanya berorientasi pada keuntungan sehingga tidak berkepentingan melarang pemotongan sapi betina produktif. Disamping itu pemenuhan kebutuhan melalui kebijakan impor tidak melihat kemandirian disisi dalam negeri sehingga volume impor yang selalu tinggi dan harga ditingkat konsumen juga tetap tinggi, pertumbuhan produksi peternakan nasional relatif lambat. Ketidakseimbangan pertumbuhan permintaan dan kapasitas produksi daging nasional yang mengakibatkan ketergantungan terhadap impor ini diterjemahkan sebagai ketidakmandirian dalam penyediaan pangan nasional.

Program swasembada daging sapi (PSDS) yang ditetapkan pemerintah ingin memberdayakan peternak lokal dengan meningkatkan populasi sapi potong dan produksi daging sapi, dan juga mengatur kebijakan impor dengan cara menurunkan volume impor daging sapi nasional secara bertahap. Impor yang diperbolehkan sebesar 15 persen dari kebutuhan daging sapi secara nasional atau sekitar 80.000 ton (Nursalamah, 2013). Keadaan seperti ini belum mampu mewujudkan swasembada daging karena disisi peternak sebagai produsen sapi potong tidak ada keuntungan lebih yang didapatkan dari penjualan ternak potong, karena patokan minimal penjualan ternak sapi potong belum ada aturan yang jelas. Permasalahan utama dalam mewujudkan swasembada daging sapi di Indonesia saat ini adalah laju permintaan lebih cepat dari pada produksi daging yang ditawarkan. Permintaan daging sapi yang meningkat cepat merupakan akumulasi dari peningkatan jumlah penduduk, peningkatan daya beli masyarakat, dan perubahan selera.

Selama periode 1999–2010 konsumsi daging sapi mengalami peningkatan rata-rata 4.49 persen per tahun. Sementara itu produksi daging sapi domestik hanya tumbuh rata-rata 2.58 persen per tahun. Kondisi tersebut mengakibatkan impor daging sapi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dengan laju pertumbuhan rata-rata 21.58 persen per tahun. (Kusriatmi 2014). Secara agregat, Indonesia merupakan negara importir produk peternakan termasuk produk daging sapi dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa produksi daging dalam negeri tidak bisa memenuhi permintaan yang ada.

Ilham (2001) memperkirakan jika tidak ada perubahan teknologi secara signifikan dalam proses produksi daging sapi dalam negeri serta tidak adanya peningkatan populasi sapi yang berarti, maka kesenjangan antara produksi daging sapi dan kerbau dengan jumlah permintaan akan semakin melebar, dan harga yang harus dikorbankan dalam tataniaga daging sapi juga tinggi sehingga berdampak pada volume impor yang semakin besar, hal ini tentu saja kegagalan untuk bisa mencapai swasembada daging sapi dan kerbau secara berkelanjutan. Keadaan saat ini sulit untuk mendapatkan sapi bakalan dari luar negeri yang nantinya sebagai usaha penggemukan karena harga yang relatif mahal akibat

melemahnya nilai rupiah. Indonesia adalah *price taker* terkait dengan impor produk sapi potong. Dalam hal ini stabilitas nilai tukar rupiah akan berpengaruh terhadap harga impor sapi potong baik nantinya berupa aturan pajak atau tarif dan kuota terhadap impor ternak dan daging sapi (Yuzaria 2009).

Kebijakan PSDSK 2014 merupakan upaya pemerintah untuk mendorong produksi daging sapi nasional. Program PSDSK 2014 dirinci menjadi lima kegiatan pokok, yaitu (1) penyediaan bakalan/daging sapi lokal, (2) peningkatan produktivitas dan reproduktivitas ternak sapi lokal, (3) pencegahan pemotongan sapi betina produktif, (4) penyediaan bibit sapi lokal, dan (5) pengaturan stok daging sapi dalam negeri (Ditjen Peternakan 2011).

Setiap faktor yang bisa mendukung program swasembada daging sapi bisa jadi faktor tersebut yang menyebabkan tidak tercapainya swasembada daging sapi, misalkan faktor produksi sapi lokal itu sendiri mulai dari pembibitan, pemeliharaan dan persilangan, ada juga faktor manajemen kelembagaan yang mengatur bagaimana program swasembada daging sapi bisa tercapai serta data akurasi kebutuhan daging sapi dan juga ada faktor kebijakan yang mengarahkan kepada kegiatan untuk mencapai program swasembada. Menurut Tawaf (2014) ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan program swasembada daging sapi dan kerbau meliputi: filosofi konsep swasembada daging sapi, akurasi data populasi sapi dan kerbau, kebijakan impor tanpa batas, data produksi dan konsumsi daging sapi, kebijakan harga, sistem logistik dan sarana penunjang sistem distribusi sapi dan daging dan program perbibitan.

Menurut Martondang dan Rusdiana (2013) permasalahan dalam mewujudkan swasembada daging sapi kerbau terkendala oleh berbagai aspek seperti aspek teknis meliputi rendahnya produktivitas sapi dan kerbau lokal yang berdampak kepada populasi sapi dan kerbau dalam negeri, masalah perbibitan, dan skala usaha peternakan rakyat. Aspek ekonomi meliputi tidak stabilnya kondisi ekonomi pasar sapi domestik yang dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, karena adanya volume impor daging sapi dan sapi bakalan yang berdampak kepada harga daging sapi dalam negeri. Aspek kelembagaan yang meliputi asosiasi untuk program dan pelaksanaannya, pembentukan badan usaha untuk peternakan lokal. Perlu melihat bagaimana pelaksanaan program

swasembada daging sapi dan kerbau yang telah gagal pada setiap periode pencapaiannya, maka dari uraian diatas perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran pelaksanaan program swasembada daging sapi dan kerbau nasional selama ini ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kegagalan swasembada daging sapi dan kerbau nasional ?
3. Bagaimana proyeksi swasembada daging sapi dan kerbau nasional ?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas , maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Melihat gambaran pelaksanaan program swasembada daging sapi dan kerbau nasional selama ini .
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan swasembada daging sapi dan kerbau nasional.
3. Melihat keadaan dan proyeksi swasembada daging sapi dan kerbau nasional.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain untuk :

1. Memperoleh gambaran tentang kegagalan program swasembada daging nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat dijadikan evaluasi dan perbaikan untuk program swasembada daging sapi dan kerbau selanjutnya.
2. Menambah literatur tentang aspek ekonomi pertanian dari program swasembada daging sapi nasional.
3. Sebagai masukan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan program swasembada daging sapi.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah ekonomi daging sapi dan kerbau di Indonesia telah dilakukan antara lain oleh Kusriatmi (2014), Ilham (1998), Kariyasa (2004), dan Tseuo (2011). Kusriatmi (2014) membahas dampak kebijakan swasembada daging terhadap kinerja sektor ekonomi peternakan, Ilham (1998) membedakan penawaran daging sapi yang berasal dari

peternakan rakyat dan industri peternakan. Sementara Kariyasa (2004) membahas penawaran dan permintaan daging sapi dengan adanya krisis dan setelah krisis ekonomi, dan Tseuoa (2011) membahas produksi daging sapi yang berasal dari pemotongan sapi bakalan impor setelah dilakukan penggemukan di dalam negeri dan memisahkan daging sapi hasil pemotongan sapi bakalan impor dengan produksi daging sapi lokal. Dalam penelitian tersebut belum dilakukan kajian tentang program swasembada daging sapi dan kerbau yang telah berlangsung. Sedangkan Hutagaol (2013) membahas tentang populasi sapi potong dan implikasinya terhadap program swasembada daging sapi dan kerbau di Indonesia.

Penelitian ini diawali dengan memberikan gambaran umum tentang konsep swasembada daging sapi nasional yang telah lama dicanangkan tetapi belum mencapai swasembada yang diharapkan, penelitian ini lingkup penelitiannya adalah melihat Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau Indonesia karena secara umum Indonesia belum bisa mencapai swasembada daging sapi namun untuk daerah tertentu sudah bisa swasembada daging sapi untuk kebutuhan lokalnya.

Penelitian secara spesifik menggali mengapa swasembada daging sapi dan kerbau nasional gagal tercapai, Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) yang terakhir diluncurkan pada tahun 2014 merilis kegiatan pokok dan operasional untuk mendukung pencapaian program tersebut. Secara langsung kegiatan tersebut sangat mempengaruhi program swasembada daging sapi dan kerbau seperti penyediaan sapi dan kerbau bakalan, peningkatan produktivitas ternak dan penyediaan bibit sapi melalui teknologi, pencegahan pemotongan sapi betina produktif dan melihat stok daging sapi dan kerbau serta mengatur tataniaga daging sapi dan kerbau maupun ternak bakalan untuk menangkai impor yang berlebihan. hal ini bisa dilihat faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kegagalan dari swasembada daging sapi tersebut, tahapan selanjutnya adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan tercapainya swasembada daging sapi nasional, dari hasil regresi yang dilakukan di dapatkan nantinya faktor apa saja yang berpengaruh signifikan mengapa swasembada gagal tercapai, dengan begitu dapat diberikan kesimpulan mengenai penelitian yang dilakukan.